

Analisis Pengaruh Dana Otonomi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Papua Barat

Rengga Bayu Widiaprana*

Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah

Article History:

Received: November 30, 2022

Accepted: December 30, 2022

*Corresponding Author

E-mail:

renggabayuwidiaprana@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the effect of Dana Otonomi Khusus and Pendapatan Asli Daerah (PAD) on Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) in Regencies and Cities in West Papua Province, during period 2018 to 2021. This study uses quantitative research methods with analysis panel data regression using the double logarithm function. The application used to process the data is the STATA application. The results showed that the Dana Otonomi Khusus had an insignificant relationship to PDRB, while PAD had a positive and significant relationship to PDRB. The results of the study also show that the Dana Otonomi Khusus and PAD together have a significant influence on PDRB in Regencies and Cities in West Papua Province.

Keywords: *Dana Otonomi Khusus, PAD , PDRB , West Papua Province*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Dana Otonomi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Papua Barat, dalam kurun waktu tahun 2018 sampai dengan 2021. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan analisis regresi data panel yang menggunakan fungsi dobel logaritma. Adapun aplikasi yang digunakan untuk mengolah data adalah Aplikasi STATA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Otonomi Khusus memiliki hubungan yang tidak signifikan terhadap PDRB, sedangkan PAD memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap PDRB. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Dana Otonomi Khusus dan PAD secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PDRB pada Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat.

Kata Kunci: **Dana Otonomi Khusus, PAD , PDRB , Provinsi Papua Barat**

PENDAHULUAN

Provinsi Papua Barat beserta semua Kabupaten dan Kota yang terdapat didalamnya mendapatkan alokasi dana dari APBN, yang salah satunya berupa Dana Otonomi Khusus. Dengan adanya Dana Otonomi Khusus diharapkan membantu perekonomian semua daerah di Provinsi Papua Barat dan dapat mensejahterakan masyarakatnya. Dana Otonomi Khusus ini diberikan agar Provinsi Papua Barat tidak tertinggal dari Provinsi lain.

Setelah dua puluh tahun, Pemerintah kembali melanjutkan kebijakan Dana Otonomi Khusus ini, dengan menetapkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat. Pada saat akan ditetapkan kebijakan ini, terdapat Pro dan Kontra atas diberlanjutkannya kembali Dana Otonomi Khusus (Otsus) di Provinsi Papua Barat. Kubu yang pro terhadap kebijakan ini menilai bahwa dana otsus telah membantu pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua Barat. Dapat dilihat dari total pembangunan jalan di trans papua yang telah mencapai 3.279 kilometer (<https://www.kompas.com>) . Sedangkan kubu yang kontra lebih banyak berasal dari pihak separatis yang menginginkan masyarakat Papua diberi hak untuk menentukan nasibnya sendiri melalui kemerdekaan.

Selain Dana Otonomi Khusus, setiap kabupaten dan kota juga memiliki sumber pendapatan yang berasal dari daerah mereka sendiri. Pendapatan ini dinamakan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan ini disetujui oleh DPRD untuk kemudian dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam pos Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah daerah dapat menggunakan PAD untuk membangun daerahnya.

Selanjutnya, hasil dari pembangunan ini dicerminkan dalam pertumbuhan ekonomi. Untuk melihat pertumbuhan ekonomi, kita dapat melihat kepada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah (<https://bps.go.id>).

Sebagai Provinsi ke-28 di Indonesia, Papua Barat terdiri dari 12 Kabupaten dan 1 Kota, yaitu Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Fak Fak, Kabupaten Raja

Ampat, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Tambraw, Kabupaten Pegunungan Arfak dan Kota Sorong. Semua Kabupaten dan Kota ini menerima Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan juga memiliki PAD dalam membangun ekonomi di daerahnya.

Atas dasar beberapa poin di atas, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh Dana Otonomi Khusus dan PAD terhadap PDRB pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Papua Barat, dalam kurun waktu tahun 2018 sampai dengan 2021.

STUDI LITERATUR

Di dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua, dinyatakan bahwa Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak dasar masyarakat Papua.

Pada pasal 34 ayat (1) dinyatakan bahwa sumber-sumber penerimaan provinsi dan kabupaten/kota pada Provinsi Papua Barat adalah :

- a. Pendapatan Asli Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- b. Dana Perimbangan;
- c. Penerimaan Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka Otonomi Khusus;
- d. Pinjaman daerah; dan
- e. Lain-lain penerimaan yang sah

**Catatan:**

UU 2 tahun 2021 merupakan UU *lex specialis* dibandingkan UU sectoral yang lain

Gambar 1. Kekhususan pada Provinsi Papua

Sumber : UU Nomor 2 Tahun 2021

Monitoring penyaluran dana otonomi khusus lingkup Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2022, per 11 Maret 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Monitoring Penyaluran Otsus per 11 Maret 2022

No	Daerah	Pagu		
		Dana Otsus	DTI	Jumlah
1	Provinsi Papua Barat	910.224.000.000	1.396.618.711.000	2.306.842.711.000
2	Kabupaten Fak Fak	145.945.815.000	46.135.370.000	192.081.185.000
3	Kabupaten Manokwari	158.999.223.000	47.801.370.000	206.800.593.000
4	Kabupaten Sorong	155.249.583.000	46.135.371.000	201.384.954.000
5	Kota Sorong	134.980.505.000	41.470.572.000	176.451.077.000
6	Kabupaten Raja Ampat	156.636.020.000	46.135.371.000	202.771.391.000
7	Kabupaten Sorong Selatan	128.907.712.000	42.803.372.000	171.711.084.000
8	Kabupaten Teluk Bintuni	155.133.356.000	46.135.371.000	201.268.727.000
9	Kabupaten Teluk Wondama	116.150.627.000	46.135.371.000	162.285.998.000
10	Kabupaten Kaimana	129.287.711.000	46.135.370.000	175.423.081.000
11	Kabupaten Maybrat	148.761.721.000	46.135.371.000	194.897.092.000
12	Kabupaten Tambrauw	142.882.657.000	46.135.371.000	189.018.028.000
13	Kabupaten Manokwari Selatan	101.175.661.000	23.156.245.000	124.331.906.000
14	Kabupaten Pegunungan Arfak	137.265.409.000	46.135.371.000	183.400.780.000
Jumlah		2.721.600.000.000	1.967.068.607.000	4.688.668.607.000

Sumber: OM SPAN

Monitoring realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Kabupaten dan Kota pada Provinsi Papua Barat, per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Realisasi Pendapatan Asli Daerah per 31 Desember 2021

No.	Kabupaten/Kota	PAD
1	Fak Fak	34,037,251,490
2	Kaimana	29,987,502,046
3	Teluk Wondama	16,518,732,152
4	Teluk Bintuni	41,440,818,219
5	Manokwari	60,846,315,783
6	Sorong Selatan	9,755,936,924
7	Sorong	26,593,103,832
8	Raja Ampat	12,709,741,407
9	Tambrauw	5,497,775,357
10	Maybrat	16,777,640,045
11	Kota Sorong	77,725,316,865
12	Manokwari Selatan	80,497,053,891
13	Pegunungan Arfak	4,098,533,592

Sumber: Laporan Keuangan Pemda (Audited) Tahun 2021

Pada penelitian ini, variabel Produk Domestik Regional Bruto menggunakan PDRB berdasarkan harga berlaku, yang diambil dari situs BPS Provinsi Papua Barat. Adapun PDRB menurut harga berlaku untuk Kabupaten dan Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 3. PDRB Menurut Harga berlaku – 2021

No.	Kabupaten/Kota	PDRB
1	Fak Fak	5,340,478.25
2	Kaimana	2,668,458.79
3	Teluk Wondama	1,559,346.28
4	Teluk Bintuni	3,138,755,291.00
5	Manokwari	9,807,512.65
6	Sorong Selatan	1,965,129.27
7	Sorong	11,193,968.21
8	Raja Ampat	3,484,325.87
9	Tambrauw	243,663.22
10	Maybrat	751,293.99
11	Kota Sorong	15,461,367.00
12	Manokwari Selatan	861,074.50
13	Pegunungan Arfak	242,948.00

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2021

Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu telah meneliti hubungan antara Dana Otsus terhadap beberapa hal, mulai dari Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Kemiskinan hingga Pemberantasan Korupsi. Diantaranya penelitian dari Akbar, *et al* (2021) yang meneliti hubungan antara penerapan Otsus dan pemberantasan korupsi di Aceh, penelitian dari Juliarini dan Hatmoko (2020) yang meneliti hubungan antara Otsus dengan IPM di Tanah Papua dan penelitian dari Rahma (2021) yang meneliti hubungan Otsus dengan Kemiskinan Kabupaten/Kota di Papua Barat tahun 2016-2019.

Sedangkan penelitian terdahulu yang meneliti hubungan antara PAD dengan pertumbuhan ekonomi, memakai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator dalam pertumbuhan ekonomi. Diantaranya penelitian dari Fadhly (2016) dan dari Lugastoro (2013).

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Kuantitatif. Pendekatan ini berhubungan dengan pengumpulan data dan bertujuan untuk menjelaskan hubungan antarvariabel, menguji teori, dan melakukan generalisasi atas objek penelitian. Penelitian ini menggunakan variabel Dana Otonomi Khusus, PAD, dan PDRB dalam kurun waktu 2018-2021. Metode Estimasi yang digunakan adalah Metode Analisis Regresi Data Panel dan Analisis Regresi menggunakan Fungsi Double Logaritma.

Metode Analisis Regresi ini menganalisis hubungan antar variabel dengan dua variabel diperlakukan asymetry (dependent Variable dan Independent Variable). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah PDRB dan variabel independennya adalah Dana Otonomi Khusus dan PAD. Untuk membantu penelitian digunakan Aplikasi STATA.

Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian yang diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_0 = Dana Otsus dan PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB Kabupaten/Kota lingkup Provinsi Papua Barat.

H_1 = Dana Otsus dan PAD berpengaruh signifikan terhadap PDRB Kabupaten/Kota lingkup Provinsi Papua Barat.

Adapun kriteria pengujian dalam penelitian ini, H_0 diterima apabila tingkat signifikansi $> 0,05$ sedangkan H_1 diterima apabila tingkat signifikansi $< 0,05$.

Formulasi Model Penelitian

Adapun formulasi model dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + u_t$$

dimana :

Y_t = Pertumbuhan ekonomi (PDRB)

x_1 = Dana Otsus

x_2 = PAD

Sumber Data

Data yang digunakan pada penelitian ini berasal dari Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Provinsi Papua Barat, periode 2018 sampai dengan 2021.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Hal yang pertama dilakukan sebelum penelitian, setelah melakukan screening data adalah melakukan deskriptif statistik. Deskriptif statistik bertujuan untuk mengetahui mean, median, nilai tertinggi, nilai terendah, standar deviasi setiap variabel data Kabupaten/Kota.

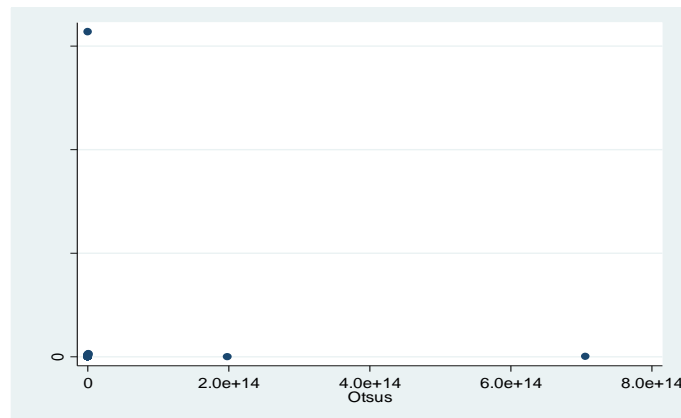
Tabel 4. Statistik Deskriptif Otsus, PAD dan PDRB

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
Otsus	52	1.75e+13	1.01e+14	5.21e+10	7.06e+14
PAD	52	3.71e+10	3.58e+10	3.74e+09	1.88e+11
PDRB	52	6.54e+07	4.35e+08	141212.4	3.14e+09

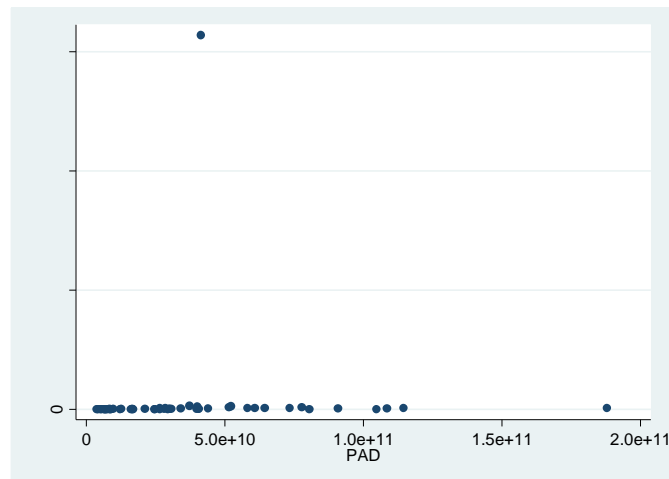
Tes Outlier dengan Scatter Plot

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan tipe data panel. Data Panel merupakan gabungan data *time series* dan *cross section*. Data *time series* adalah data dengan beberapa periode waktu tertentu, sedangkan data *cross section* merupakan data yang diperoleh dari satu maupun lebih objek penelitian dalam satu periode yang sama. Penelitian ini menggunakan data time series selama 4 tahun ($t = 4$) yakni dari tahun 2018 hingga dengan tahun 2021, sedangkan data cross section dalam penelitian ini adalah 13 daerah ($n = 13$). Sehingga total data yang digunakan dalam penelitian ini adalah $4 \times 13 = 52$ data. Kemudian,

dilakukan screening data untuk menemukan data yang outlier dengan menggunakan Scatter Plot.



Gambar 1. Scatter Plot PDRB dan Otsus



Gambar 2. Scatter Plot PDRB dan PAD

Pada Gambar 1, Scatter Plot hubungan antara PDRB dan Otsus menunjukkan terdapat outlier dan titik-titik tampak berjauhan yang membuktikan lemahnya hubungan antara PDRB dan Otsus. Sedangkan pada Gambar 2 Scatter Plot hubungan antara PDRB dan PAD menunjukkan tidak outlier dan titik – titik tampak berdekatan yang membuktikan kuatnya hubungan antara PDRB dan PAD.

Analisis Regresi Data Panel – Fungsi Dobel Logaritma

Tabel 5. Analisa Regresi Data Panel dengan Fungsi Dobel Logaritma

. reg L_PDRB L_Otsus L_PAD						
Source	SS	df	MS	Number of obs	=	52
Model	72.7865765	2	36.3932882	F(2, 49)	=	20.16
Residual	88.4615725	49	1.80533821	Prob > F	=	0.0000
				R-squared	=	0.4514
				Adj R-squared	=	0.4290
Total	161.248149	51	3.16172841	Root MSE	=	1.3436

L_PDRB	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
L_Otsus	-.0077998	.1163196	-0.07	0.947	-.2415527	.2259532
L_PAD	1.221541	.1923851	6.35	0.000	.8349282	1.608153
_cons	-14.31627	5.464128	-2.62	0.012	-25.29685	-3.335696

Pengujian Model Keseluruhan (Uji F)

Dari Tabel 5 dapat dilihat Uji F, yaitu apabila nilai $F < 0,05$ maka Uji F menerima H_1 pada taraf signifikansi 5% atau yang berarti semua variabel independen (Dana Otsus dan PAD) secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (PDRB).

Pengujian Model Sebagian (Uji T)

Nilai Uji T dikatakan signifikan pada taraf 5% apabila pada kolom $P>[t]$ atau disebut juga p value/signifikansi $< 0,05$. Dari Tabel 4.2 dapat diinterpretasikan bahwa PAD memiliki hubungan yang signifikan terhadap PDRB, sedangkan Dana Otsus memiliki hubungan yang tidak signifikan terhadap PDRB.

Interpretasi Model Analisis Regresi Data Panel dengan Fungsi Dobel Logaritma

Dari Tabel 5, diperoleh estimasi model sebagai berikut :

$$\text{PDRB} = -14,31 + (-0,077) \cdot \text{Otsus} + 1,221 \cdot \text{PAD}$$

yang memiliki arti :

- Jika Otsus naik sebesar satu unit rasio, maka PDRB akan turun sebesar 0,077.
- Jika PAD naik sebesar satu unit rasio, maka PDRB akan naik sebesar 1,221.

Pembahasan

1. Dana Otonomi Khusus berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap PDRB Kabupaten dan Kota di Provinsi Papua Barat

Dana Otonomi Khusus berpengaruh negatif tidak signifikan pada $\alpha = 5\%$ dengan nilai koefisien sebesar -0,077, artinya ketika Dana Otonomi Khusus naik 1 unit rasio, maka PDRB akan turun sebesar 0,077 dengan asumsi variabel lainnya konstan. Hal ini menunjukkan bahwa dana otsus tidak berpengaruh kuat terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota di Provinsi Papua Barat, dan kalau pun ada pengaruh, maka kecenderungan hubungan itu menuju ke arah negatif. Hal ini sesuai dengan penelitian Juliarini dan Hatmoko (2020) dan Kambu (2004). Juliarini dan Hatmoko (2020) menyatakan bahwa Dana Otsus memiliki pengaruh yang sangat kecil terhadap IPM di Provinsi Papua Barat, yang disebabkan oleh faktor geografi, demografi, sosiologi ataupun kebijakan pemerintah setempat. Kambu (2004) menemukan bahwa alokasi pembagian dana Otsus selama tahun 2002 dan 2003 dirasakan kurang memenuhi syarat adil dan berimbang antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Provinsi. Dimana alokasi pembagian dana ditetapkan 40% untuk Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi sebesar 60%. Alokasi pembagian dana Otsus untuk Kabupaten/Kota perlu ditetapkan lebih banyak dibandingkan Pemerintah Provinsi agar pembangunan tidak terhambat dan merata di seluruh pelosok Papua. Alokasi dana Otsus untuk Kabupaten/Kota perlu lebih besar karena titik berat pelayanan jasa Pemerintahan meliputi pendidikan dan kesehatan hanya akan lebih efektif jika ditangani Pemerintah Kabupaten.

Hasil penelitian ini juga ditemukan pada Provinsi Aceh, yang juga memiliki Dana Otonomi Khusus. Akbar, *et al* (2021) menyatakan bahwa Dana Otonomi Khusus Aceh tidak diawasi dengan serius, sehingga belum dapat mengurangi tingkat korupsi penggunaan dana otsus sehingga belum meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh. Yassirli dan Syahnur (2018) menemukan bahwa dana otsus pendidikan dan kesehatan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh.

Hasil penelitian yang tidak sesuai dengan penelitian ini adalah penelitian Rahma (2021), yang menyatakan bahwa Dana Otonomi Khusus memiliki pengaruh positif dan signifikan dalam mengurangi angka kemiskinan masyarakat di Papua.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyatakan bahwa, penggunaan Dana Otsus cukup dominan digunakan untuk bidang infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan dibandingkan dengan jenis penggunaan lainnya (<https://djpk.kemenkeu.go.id>). Di bidang pendidikan, digunakan antara lain untuk pembangunan ruang kelas, pengadaan buku, asrama siswa, pengembangan pusat IT, dan pengadaan laboratorium mobile. Sementara itu, di bidang kesehatan digunakan antara lain untuk pengadaan obat-obatan, peralatan laboratorium,

perbaikan gizi masyarakat, serta pencegahan dan penanggulangan penyakit menular. Sedangkan untuk DTI antara lain digunakan untuk pembangunan jalan 1.168,75 km, pembangunan jembatan 1.622 meter, pemeliharaan jalan dan jembatan 1.105,26 km, dan peningkatan kualitas jalan 1.291,66 km.

Melihat dari komposisi penggunaan dari Dana Otsus ini, pemerintah yang telah memperoleh dana otsus, seharusnya tetap memiliki *effort* lain dalam memajukan ekonomi di daerahnya. Pemerintah daerah bisa melakukan peningkatan kualitas SDM, tata kelola pemerintahan dan perundang-undangan. Hal ini dikarenakan beberapa temuan penelitian terdahulu (sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya) lebih banyak menemukan bahwa Dana Otonomi Khusus belum dan/atau tidak memiliki hubungan yang signifikan dalam pertumbuhan ekonomi.

2. PAD berpengaruh positif signifikan terhadap PDRB Kabupaten dan Kota di Provinsi Papua Barat

Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan pada $\alpha = 5\%$ dengan nilai koefisien sebesar 1,221, artinya ketika PAD naik 1 unit rasio, maka PDRB akan naik sebesar 1,221 dengan asumsi variabel lainnya konstan. Hal ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, sebagai pendapatan yang menunjukkan tingkat kemandirian suatu Kabupaten dan/atau Kota, memiliki pengaruh yang lebih kuat daripada Dana Otsus dalam mempengaruhi PDRB di suatu Kabupaten dan/atau Kota.

Penelitian terdahulu yang meneliti hubungan antara PAD dengan pertumbuhan ekonomi, memakai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator dalam pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian Fadhly (2016) yang menyatakan terdapat pengaruh negatif dan tidak signifikan antara pendapatan asli daerah terhadap indeks pembangunan manusia (IPM). Hal ini bisa terjadi jika PAD yang berasal dari Pajak Daerah dan retribusi Daerah ditingkatkan maka akan mengakibatkan masyarakat terbebani pajak dan retribusi semakin besar. Hasil penelitian yang sama dengan penelitian ini berasal dari Lugastoro (2013) yang menyatakan PAD memiliki hubungan positif signifikan terhadap IPM.

Di dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Undang-Undang, yang terdiri dari :

- a. Pendapatan Pajak Daerah;
- b. Pendapatan Retribusi Daerah;
 - 1. Retribusi Jasa Umum
 - 2. Retribusi Jasa Usaha
 - 3. Retribusi Perizinan Tertentu
- c. Lain-lain PAD yang Sah;
 - Penerimaan Jasa Giro
- d. Pendapatan dari Pengembalian

Pemerintah daerah yang memiliki sumber pendapatan asli daerah yang tinggi, dapat dinyatakan semakin mampu dalam membiayai perekonomian dan berefek domino pada pertumbuhan ekonomi daerahnya. Setiap daerah akan semakin mandiri dalam mencari sumber-sumber pendapatan, karena tingkat kemandirian ini akan menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri daerahnya.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Menurut hasil uji keseluruhan yang diperoleh terdapat sebuah kesimpulan yaitu Dana Otonomi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah secara simultan berpengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten dan Kota di Provinsi Papua Barat.

Sedangkan hasil uji parsial membuktikan jika : (1) Dana Otonomi Khusus memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten dan Kota di Provinsi Papua Barat. Hal ini menunjukkan bahwa Dana Otonomi Khusus tidak berpengaruh kuat terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota di Provinsi Papua Barat, dan kalau pun ada pengaruh, maka kecenderungan hubungan itu menuju ke arah negatif. Rekomendasi yang dapat diberikan adalah pemerintah yang memperoleh dana otsus yang besar, agar tetap memiliki *effort* lain dalam memajukan ekonomi di daerahnya, diantaranya melalui peningkatan kualitas SDM, tata kelola pemerintahan dan perundang-undangan; (2) Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten dan Kota di Provinsi Papua Barat. Hal ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, sebagai pendapatan yang menunjukkan tingkat kemandirian suatu Kabupaten dan/atau Kota, memiliki pengaruh yang lebih kuat daripada Dana Otsus dalam mempengaruhi PDRB di suatu Kabupaten dan/atau Kota. Rekomendasi yang dapat diberikan adalah Pemda yang memiliki sumber pendapatan asli daerah yang tinggi, maka semakin mampu daerah itu dalam membiayai perekonomian dan berefek domino pada pertumbuhan

ekonomi daerahnya. Rekomendasi yang dapat diberikan adalah setiap daerah harus semakin mandiri dalam mencari sumber-sumber pendapatan, karena tingkat kemandirian ini akan menunj

menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri daerahnya.

Saran

Saran yang bisa diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah dikarenakan penelitian ini masih menggunakan metode kuantitatif, maka ada baiknya jika penelitian selanjutnya dilakukan secara kualitatif deskriptif, dengan terjun langsung ke masyarakat. Metode pengumpulan data yang bisa ditambahkan adalah metode wawancara secara “depth interview”, yaitu dengan melakukan wawancara secara mendalam, baik kepada masyarakat yang telah menerima Dana Otsus maupun yang belum menerima Dana Otsus tersebut.

REFERENSI

Buku

Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat. 2021. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten dan Kota di Provinsi Papua Barat. Manokwari. BPS Provinsi Papua Barat.

Kambu, Hans Wim dan Samsubar Saleh. 2004. “Analisis Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Otonomi Khusus di Provinsi Papua”. Tesis. Yogyakarta : Universitas Gajah Mada.

Lugastoro, Decra Pitron. 2013. “Analisis Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Jawa Timur”. Skripsi. Malang : Universitas Brawijaya.

Rahma, Miftahur. 2021. “Pengaruh Dana Otonomi Khusus, Indeks Pembangunan Manusia dan Infrastruktur Jalan terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat Tahun 2016 – 2019”. Skripsi. Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jurnal

Akbar, Khairil, Zahlul Pasha Karim, Nyak Fadlullah, Muhammad Siddiq Armia. 2021. Sistem Pengawasan Dana Otonomi Khusus Aceh dan Dampaknya terhadap Pemberantasan Korupsi. *INTEGRITAS : Jurnal Antikorupsi*. pp. 101-120.

Fadhly, Zul. 2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Barat. *ejournal unp*. pp. 2978-2189.

Juliarini, Aniek dan Agung Widi Hatmoko. 2020. Pengaruh Dana Otonomi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Tanah Papua. *Simposium Nasional Keuangan Negara*. pp. 335.

Yassirli, dan Sofyan Syahnur. 2018. Pengaruh Dana Otsus Pendidikan dan Kesehatan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*. pp. 495-505.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Publikasi Eletronik

<https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=bagaimana-pemanfaatan-dana-otsus#:~:text=Penggunaan%20Dana%20Otsus%20tahun%202017,IT%2C%20dan%20pengadaan%20laboratorium%20mobile>, 2017, diakses pada 5 Juni 2022.

https://id.wikipedia.org/wiki/Produk_domestik_regional_bruto, diakses pada 4 Juni 2022.

<https://www.kompas.com/properti/read/2021/12/04/210000421/pembangunan-jalan-trans-papua-tembus-3.279-kilometer-ini-sisanya>, 2021, diakses 4 Juni 2022